

KONFLIK HORIZONTAL MASYARAKAT KAYUMALUE DENGAN TAWAELI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hasan Muhamad^{1*}

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

REPUBLIKASI DARI

Muhamad, H. (2015). *Konflik Horizontal Masyarakat Kayumalue dengan Tawaeli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Ilmiah Santina*, 2(4), 1-13. (Platform publikasi awal tidak lagi aktif, diterbitkan kembali untuk menjaga akses penelitian).

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

28-06-2025

Disetujui:

28-06-2025

Dipublikasi:

30-06-2025

Kata Kunci:

*Konflik Horizontal; Resolusi
Konflik*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap dan mendalam tentang konflik laten antar kelompok masyarakat di Kelurahan Kayumalue Ngapa dan Panau Tawaeli, Kota Palu. Unit analisis penelitian mencakup masyarakat yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam konflik horizontal di kedua kelurahan tersebut. Teknik pengambilan data menggunakan metode snowball sampling dengan informan yang dipilih dari tokoh masyarakat setempat yang memahami kronologi permasalahan dan sejarah konflik di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab konflik antara masyarakat Kayumalue dan Tawaeli meliputi: (1) faktor sejarah, yakni konflik yang sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda; (2) permasalahan tapal batas; (3) konsumsi minuman keras di kalangan pemuda yang memicu konflik terbuka; dan (4) keterbatasan lapangan kerja serta rendahnya tingkat kesibukan akibat kurangnya aktivitas produktif. Dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat Kayumalue dan Tawaeli terdiri atas dampak negatif dan positif. Dampak negatif meliputi: (a) tumbuhnya rasa saling dendam antarkelompok, dan (b) pengaruh negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Sementara itu, dampak positif yang muncul antara lain: (a) meningkatnya solidaritas internal dalam masing-masing kelompok masyarakat, dan (b) tumbuhnya kreativitas pada masing-masing kelompok.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang terintegrasi dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda tetapi tetap satu) perlahan terancam dalam era Reformasi. Supremasi ditegakkan, keadilan dan hak asasi manusia diperjuangkan, pembangunan fisik serta aspek kehidupan digalakkan. Akan tetapi di tengah akselerasi pembangunan tersebut, konflik sosial yang terjadi pada sebagian daerah Indonesia seperti Irian Jaya, Aceh, Ambon, dan Poso merupakan suatu bentuk masalah sosial. Dalam hidup berbangsa, pembangunan konsensus sering kali tidak mudah dicapai. Konflik adalah produk dinamika hubungan antar kelompok, sama halnya dengan konsensus. Konflik dan konsensus muncul bergantian dan sekaligus menandai dinamika hubungan antar kelompok di dalam masyarakat.

Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia pada umumnya berkembang di sekeliling garis multikulturalitas masyarakat. Nuansa suku bangsa, etnis, agama, dan pelapisan sosial mewarnai konflik-konflik yang kerap terjadi. Dan apabila ditinjau dari cara pandang sosiologis, konflik dikaitkan dengan masalah primordial. Ia menyatakan bahwa adanya keunikan dan eksistensi budaya membatasi interaksi antar kelompok di berbagai daerah. Penjelasan konflik dari pendekatan ini berkisar pada unsur psikologi dan budaya, dengan mana individu kelompok memahami diri dan pihak lain.

Konflik yang menyeret wacana primordial umum terjadi dalam konflik di Kalimantan (etnis Madura, Melayu, dan Dayak), di Ambon, Poso, dan Halmahera (kaum migran, pribumi, Muslim, Nasrani, klien-klien elit politik), kerusuhan sosial dan etnis Mei 1998 di Jakarta, konflik Aceh, serta pembantaian 1966 di Jawa dan Bali adalah sebagian konflik dalam aras ini.

Umumnya, konflik termanifestasi ke dalam dua bentuk. Pertama, konflik yang berlangsung damai tanpa menyita cost material dan spiritual seperti kerusuhan, kehilangan jiwa, cedera fisik, terputusnya hubungan antar keluarga, dan sejenisnya. Konflik semacam ini sifatnya negosiasi dan justru inheren bahkan dianjurkan dalam kehidupan bernegara, terutama dalam praktik-praktik demokrasi liberal. Kedua, konflik yang berwujud vandalistik dan violence. Konflik-konflik seperti ini yang kerap menggelisahkan mayoritas masyarakat dan para pemimpin Indonesia.

Konflik dalam bentuk yang pertama (damai) utamanya berlangsung di level elit, saat negosiasi politik berlangsung. Parlemen dan lembaga-lembaga politik formal adalah struktur penyalur konflik. Konflik dilokalisasi hanya di dalam gedung parlemen ataupun saluran-saluran demokrasi yang ada seperti pers, partai politik, LSM, organisasi kemasyarakatan, dan dialog antar tokoh sosial. Konflik yang muncul adalah produk dinamika hubungan, dan konflik menyatakan fakta-fakta yang harus diolah untuk dicarikan resolusinya.

Sebaliknya, konflik dalam pengertian kedua umum terjadi di dataran horizontal, biasanya berupa benturan antara rakyat versus rakyat, di mana yang menjadi korban adalah rakyat pula. Bahkan tidak jarang konflik di dataran horizontal sekadar kembangan sistematis dari konflik level elit. Konflik tersebut merupakan kembangan dari konflik politik di tingkat elit antara elit pro dan anti status quo.

Konflik dapat diartikan sesuatu keadaan yang statis. Konflik bersifat ekspresif, dinamis dan dialektis. Konflik adalah suatu ledakan dari sengketa atau persaingan atau perebutan dua pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa hal yang sama (baik benda maupun kedudukan). Konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah yang antara lain dilatarbelakangi oleh adanya faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, serta provokasi yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama, dan golongan, relatif sudah memperlihatkan gejala pengurangan, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Giddens (dalam Susan, 2009) mengemukakan bahwa pendekatan primordial menganggap konflik sebagai akibat dari pergesekan kepentingan kelompok identitas, seperti identitas berbasis pada etnis, kebudayaan, keagamaan, geografis, bangsa, bahasa, tribal, kepercayaan, religius, kasta, dan lain sebagainya. Pendapat Giddens tersebut menyiratkan makna bahwa pendekatan primordial melihat identitas-identitas tersebut merupakan potensi konflik yang dibentuk melalui serangkaian proses panjang, yang diwariskan secara turun-temurun melalui sosialisasi dalam institusi dalam keluarga, adanya hal ini memperkuat asumsi bahwa potensi tersebut telah mengakar dalam diri individu.

Dalam konteks ini, konflik primordial biasanya dapat muncul pada permukaan dengan melibatkan kebencian, dendam, prasangka (prejudice), dan stereotip yang sifatnya ekstrem. Kornblum (dalam Soenarto, 2003) mengutarakan bahwa stereotip adalah citra yang kaku mengenai suatu kelompok ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran citra tersebut. Dalam pandangan sosiologis, stereotip memiliki dua sifat yakni positif dan negatif. Stereotip yang bersifat positif biasanya membawa keuntungan, sedangkan stereotip yang bersifat negatif justru menjadi potensi konflik antarkelompok baik etnis maupun agama.

Senada dengan pendapat Kornblum tersebut di atas, Lan (2006) mengatakan bahwa setiap etnis atau ras cenderung mempunyai semangat dan ideologi yang etnosentris, yang menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnis atau ras lain. Tidak saling mengenal identitas budaya orang lain bisa mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, berupa sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi yang diekspresikan sebagai perasaan.

Selanjutnya, oleh Pelly (dalam Sitorus, 2003) perbedaan-perbedaan tersebut dianggap akan mempengaruhi harmoni konsensus dan intensitas potensi konflik karena picuan perbedaan kepentingan, terutama bila terdapat kelompok-kelompok yang ingin tetap dominatif melalui kiat “memancing di air keruh” dari suatu kondisi yang dipenuhi oleh ketegangan sosial.

Konflik merupakan kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Kompleksitas permasalahan sosial yang melanda bangsa Indonesia merupakan ujian dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terbukanya akses demokrasi di era reformasi harus dibayar mahal dengan lahirnya berbagai konflik sosial. Seperti militer dengan mahasiswa, militer dengan sipil, warga dengan warga, pemeluk agama satu dengan agama yang lain, yang kesemuanya mengarah pada disintegrasi bangsa. Sebagai akibat dari konflik sosial tersebut, masyarakat kini bukan hanya menderita kerusakan fisik lingkungan, tetapi juga kemerosotan moral budaya dan kehancuran sosial yang membawa akibat tidak berfungsinya lembaga sosial ekonomi yang seharusnya menopang demokratisasi.

Manusia adalah makhluk yang berkelompok dan karenanya disebut masyarakat karena adanya motivasi untuk selalu mau hidup berkelompok maka dengan sendirinya akan terwujud suatu kehidupan manusia yang senantiasa tergantung satu sama lain karena saling membutuhkan. Dengan adanya saling membutuhkan tersebut sekaligus merupakan awal terbukanya suatu masyarakat. Selanjutnya Shadily (1989) mengemukakan bahwa “Masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, karena dengan sendirinya, secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain”.

Sebagai akibat dari konflik juga, masyarakat kini mengalami proses disintegrasi, di mana ikatan sosial (social cooperation) yang terpelihara selama ini mengalami keretakan di mana antara warganya telah terpecah belah berdasarkan agama dan kesukuan juga dalam sikap, perilaku dan posisi saling bermusuhan satu sama lain. Bersamaan dengan hancurnya komunitas itu, maka segala potensi demokrasi, toleransi, kerja sama, koeksistensi damai juga terancam punah.

Demikian halnya yang terjadi di Sulawesi Tengah, beberapa tahun terakhir marak terjadi konflik yang mengarah pada kekerasan. Hal ini disebabkan oleh berbagai isu di antaranya mabuk-mabukan serta persoalan sengketa batas wilayah. Hal tersebut dipahami sebagai konflik antar warga dengan warga sehingga mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, ketakutan serta kerugian harta benda.

Konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah, pada khususnya terjadi antara masyarakat Kayumalue dan Tawaeli yang telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Di mana Belanda

pada saat itu membangun kekuasaan dan pusat pemerintahan di Tawaeli, dan bukan di Kayumalue. Mengapa demikian? Karena masyarakat Kayumalue tidak mau dijajah oleh Belanda, sehingga penempatan pusat pemerintahan itu berada di Tawaeli. Posisi pusat pemerintahan yang berada di Tawaeli melahirkan diskriminasi terhadap masyarakat Kayumalue sehingga hal ini memicu konflik pada kedua kelompok masyarakat tersebut yang lahir melalui kecemburuan sosial, antara lain adanya watak masyarakat Kayumalue yang tidak mau dipimpin oleh orang dari Tawaeli, ini yang menjadikan konflik yang berkepanjangan pada kedua kelompok masyarakat yang bertikai.

Dari sejarah konflik tersebut sampai sekarang hal itu memicu berbagai konflik berantai yang terjadi antara kedua wilayah tersebut, belum lagi modus anak muda yang dengan mabuk-mabukan sehingga yang terjadi adalah perselisihan kriminalitas di antaranya mengakibatkan perkelahian massa dan berimbas pada kerugian materi dan bahkan nyawa. Kejadian itu terjadi secara spontanitas dan tidak pernah direncanakan sebelumnya. Lama-kelamaan konflik yang disertai kekerasan telah mengakar pada kedua belah pihak yang bertikai, sehingga yang terjadi adalah ketika ada masalah walaupun hanya masalah kecil selalu terjadi pertikaian di antara dua masyarakat tersebut dan berakibat adanya tawuran antar masyarakat.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Semua cara penyelesaian konflik sifatnya menyelesaikan secara damai, namun ada satu pandangan yang dikemukakan oleh Ziegenhagen (dalam Pigay, 2000) yaitu “Bahwa konflik tidak selalu dengan pendekatan secara damai tetapi apabila dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, maka pemerintah dapat melakukan kebijakan konflik untuk mengendalikan konflik yaitu harus ada kemampuan untuk memaksa kedua kelompok dengan ancaman dan penggunaannya secara negatif atas salah satu atau kedua belah pihak yang berkonflik.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba mengkaji permasalahan sebagai berikut: (1) apa penyebab terjadinya konflik antara masyarakat Kayumalue dengan Tawaeli, dan (2) bagaimana resolusi konflik yang dilakukan antara masyarakat Kayumalue dan Tawaeli. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan teori-teori sosiologi yang berhubungan dengan teori konflik. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang mengkaji teori-teori konflik, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi para pemangku kebijakan, terutama dalam upaya merumuskan langkah-langkah resolusi konflik yang tepat dan efektif.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan bertumpu pada penelitian kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran lengkap dan mendalam tentang konflik laten antar kelompok masyarakat Kayumalue dan Tawaeli. Lokasi dan sasaran penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kayumalue Ngapa dan Panau Tawaeli.

Unit analisis yang dipilih sebagai objek penelitian adalah masyarakat Kelurahan Kayumalue Ngapa dan Panau Tawaeli, yang merupakan masyarakat yang terlibat maupun masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik horizontal. Pengambilan data dilakukan dengan metode snowball sampling. Informan dipilih dari salah satu tokoh masyarakat Kayumalue Ngapa maupun Panau Tawaeli yang mengetahui kronologi permasalahan dan sejarah konflik yang pernah terjadi pada kedua wilayah tersebut.

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dari 2 sumber, yaitu: 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat serta

pengamatan yang telah dilakukan; dan 2) Data sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang didapatkan dari proses penelitian.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelitian pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, sebagaimana pendapat Bogdan & Biklen (1990) bahwa "Analisis meliputi kegiatan mengerjakan data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesa, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dilaporkan." Untuk akurasi analisis yang dilakukan disertakan sejumlah tabel, bagan, dan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman kerajaan, Kayumalue masih bernama Kumbili. Pergantian nama dari Kumbili menjadi Kayumalue adalah hasil dari perdamaian dengan Panau Tawaeli yang pada waktu itu juga masih bernama Langgunu. Perdamaian dilakukan di daerah Tanampedagi (Labuan). Makna dari Kayumalue adalah sebuah *Kayu Nolie* yang artinya kayu yang sudah layu karena kalah berperang dengan Tawaeli dalam pandangan kekuasaan Belanda. Kayumalue sendiri menggambarkan watak masyarakat Kayumalue yang keras dan tidak mau tunduk terhadap penjajahan Belanda.

Lain halnya sejarah Tawaeli, di mana pada masa lampau yang tahunnya tidak diketahui dengan pasti terdapat kelompok manusia di sekitar kaki Gunung Desa Nupabomba yang diberi nama Paramba. Mata pencaharian mereka yaitu bertani dan berburu dengan cara berpindah-pindah. Sekelompok manusia tersebut berkembang menjadi kelompok besar. Karena penghasilan yang didapatkan tidak dapat diharapkan lagi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah bertambah banyak, beberapa keluarga mencoba mengadu nasib dengan memilih berpindah tempat dan menetap di pinggir pantai, lalu membuka lahan secara bertahap kemudian menetap.

Secara geografis, Kayumalue Ngapa memiliki luas wilayah 404,75 Ha, tanah kering 668,5 km, pemukiman 743 Ha, pekarangan 74,5 Ha, dan berbatasan dengan: 1) Sebelah Utara dengan Kelurahan Lambara Panau Tawaeli; 2) Sebelah Timur Pegunungan Verbek; 3) Sebelah Barat dengan Kayumalue Pajeko; dan 4) Sebelah Selatan Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea. Jumlah penduduk Kayumalue Ngapa adalah 4.183 jiwa atau 115 KK, dengan rincian laki-laki 2.158 jiwa dan perempuan 2.025 jiwa.

Kelurahan Panau Tawaeli memiliki kondisi daratan relatif datar. Kontur di wilayah Kelurahan Panau Tawaeli tidak variatif karena keseluruhan wilayah memiliki permukaan merata dan tidak ditemukan daerah perbukitan. Jenis tanah lempung berpasir, dengan ketinggian rata-rata 20 mdpl. Seperti pada umumnya di wilayah Kecamatan Palu Utara, kondisi Kelurahan Panau dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim panas dan hujan dengan curah hujan berkisar antara 2–7 mm, sedangkan suhu udara berkisar antara 25 °C–28 °C, kelembaban udara rata-rata sebesar 74,8% dengan kelembaban bulanan berkisar 69–79% (Statistik Data BPS Kota Palu, 2014).

Kelurahan Panau Tawaeli terletak 19 km dari pusat pemerintahan Kota Palu serta 1 km dari kecamatan. Dengan luas wilayah 2,83 km², sebagian besar wilayah dimanfaatkan pada sektor perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan area perkebunan kelapa dan sawah. Secara administrasi, Kelurahan Panau Tawaeli memiliki empat batas wilayah yaitu: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Baiya; 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kayumalue Pajeko; 3) Sebelah Barat Kabupaten Teluk Palu; dan 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lambara. Jumlah penduduk Panau Tawaeli adalah 4.968 jiwa atau 1.322 KK, dengan rincian laki-laki 2.526 jiwa dan perempuan 2.442 jiwa.

Konflik antara masyarakat Kayumalue dan masyarakat Tawaeli sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda, karena masyarakat Kayumalue adalah salah satu masyarakat di tanah Kaili yang menentang keberadaan penjajah pada saat itu. Sejak keberadaan Belanda di Tawaeli, masyarakat Kayumalue menganggap masyarakat Tawaeli membantu penjajah dan menjadi

boneka orang-orang Belanda karena masyarakat Tawaeli tidak ikut membantu melawan untuk mengusir dan hanya menerima Belanda membangun kekuasaan di Tawaeli.

Pada saat itu terjadilah perang besar antara kedua wilayah ini, di mana masyarakat Tawaeli melakukan penyerangan besar melalui jalur darat tetapi penyerangan tersebut gagal karena tidak bisa menembus wilayah utara Kayumalue yaitu "Lodji" yang disebut oleh Belanda berarti Benteng. Karena penyerangan melalui darat gagal, masyarakat Tawaeli meminta bantuan Belanda. Belanda mengingat bahwa wilayah atau masyarakat yang menerima mereka adalah Tawaeli sehingga Belanda memberikan bantuan sebuah kapal yang disebut kapal putih. Dengan bantuan tersebut masyarakat Tawaeli yang dibantu Belanda menyerang melalui jalur laut dan berhasil. Penyerangan berhenti di pantai wilayah sebelah Barat Kayumalue (Pajeko) dan langsung membunuh Kayumalue sehingga menjadi sebuah catatan sejarah konflik besar antara masyarakat Kayumalue dan Tawaeli yang disebut dengan Eo Kapapu Kayumalue.

Setelah penyerangan besar-besaran tersebut tidak menjadi akhir dari konflik antara kedua wilayah ini. Banyak masyarakat Kayumalue mengungsi ke Lembah Tanah Kaili dan menyebar ke beberapa tempat, seperti Dolo, Biromaru, Pantai Barat, dan Pantai Timur. Konflik terus terbawa sampai ke generasi-generasi berikutnya karena masyarakat Kayumalue merasa banyak ketimpangan dan ketidakseimbangan pada pemerintahan Tawaeli setelah ditinggalkan oleh Belanda.

Dari hasil pengamatan peneliti, konflik antara masyarakat Kayumalue dan Tawaeli sering terjadi secara spontan. Masalah sepele seperti saling mengejek bisa memicu perkelahian, adanya anak muda yang mabuk-mabukkan juga dipengaruhi oleh masa lalu tentang konflik yang sering terjadi antara kedua belah pihak. Hal tersebut membuat kejadian yang sebelumnya sepele menjadi konflik besar yang melibatkan masyarakat di kedua belah pihak.

Dari beberapa pernyataan informan, konflik yang sering terjadi sampai sekarang ini masih berkaitan dengan konflik sejarah masa lalu. Imbas dari sejarah tersebut menimbulkan dendam yang telah mengakar dalam diri masing-masing pihak. Sehingga dapat dianalisis bahwa faktor utama yang melatarbelakangi konflik tersebut adalah sejarah masa lalu dan masalah kecemburuan sosial, di mana sejak zaman Belanda menurut pandangan masyarakat Kayumalue bahwa Belanda lebih memihak masyarakat Tawaeli sehingga menimbulkan kecemburuan sosial oleh masyarakat Kayumalue.

Dari uraian pernyataan informan-informan tersebut, terdapat beberapa faktor pemicu konflik pada tahun-tahun belakangan ini. Konflik antara masyarakat setelah zaman kerajaan pada umumnya disebabkan oleh pengaruh minuman keras pada anak muda dalam acara-acara pesta pernikahan dan acara lainnya sehingga menimbulkan perkelahian antar anak muda yang membesar menjadi konflik antar warga. Sama halnya dengan penyebab konflik antara masyarakat Kayumalue dan Tawaeli umumnya didasari oleh hal demikian.

Berdasarkan fenomena konflik antara Kayumalue dan Tawaeli tersebut di atas, sebagaimana dituturkan para informan yang sejalan dengan teori Kornblum (dalam Soenarto, 2003), suatu konflik primordial umumnya melibatkan kebencian, dendam, dan prasangka. Prasangka mengacu pada sikap bermusuhan yang ditujukan terhadap suatu kelompok akibat adanya dugaan bahwa kelompok lain mempunyai ciri atau sifat yang tidak menyenangkan. Prasangka bersifat tidak adil karena akibat dugaan tertentu atas satu atau beberapa individu, semua anggota kelompoknya secara kaku digeneralisasi sebagai identik.

Tapal batas adalah titik perbatasan luas suatu wilayah kekuasaan sebuah negara, kerajaan, daerah, atau desa. Tapal batas menjadi salah satu penyebab berbagai konflik di Kota Palu, termasuk di wilayah Tawaeli dan Kayumalue. Masalah yang ditimbulkan oleh tapal batas tersebut dikarenakan perbedaan pembagian wilayah pada zaman kerajaan yang saat itu masih menggunakan kekuatan alam seperti gunung, sungai, ngarai, dan lembah. Perubahan tapal batas yang mungkin dulunya telah disetujui pada zaman kerajaan terbantahkan oleh pembagian wilayah

oleh pemerintah yang sudah menganut sistem pemerintahan berdasar hukum negara, ditambah lagi campur tangan oknum-oknum yang mempunyai kepentingan lain.

Dalam sejarah kerajaan, penempatan tapal batas kedua wilayah ini adalah sungai. Batas sebelah Utara wilayah Kayumalue adalah Sungai Tawaeli dari pinggir Kuala Kadongo sampai dengan pinggir Kuala Anja. Sebelah Timur berbatasan dengan Taipa yaitu tepat di jalan penurunan menuju Taipa dari sebelah Timur Kayumalue yang sekarang diberi nama Jalan Kekentina. Pada sungai yang berada di sebelah Utara Kayumalue dan di sebelah Timur Tawaeli dibangunlah jembatan yang menjadi tapal batas kedua wilayah tersebut.

Pengangguran menjadi salah satu masalah besar di Indonesia karena semakin banyak pengangguran semakin tinggi tingkat kriminalitas di beberapa wilayah besar di Indonesia. Ironisnya, Kayumalue dan Tawaeli mengalami perubahan signifikan pada sektor industri dengan berdirinya beberapa perusahaan besar di kedua wilayah tersebut. Pabrik-pabrik tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja pada pabrik pengolahan rotan didominasi oleh kaum perempuan dan sangat terbatas untuk laki-laki. Sebagian kecil yang tidak memiliki pekerjaan cenderung begadang malam sambil minum sehingga dapat menimbulkan keributan.

Konflik yang diawali dari anak-anak muda yang mabuk sangat sering menjadi konflik terbuka, saling merusak di antara kedua belah pihak dan merugikan banyak pihak. Kenakalan anak-anak muda tersebut dilakukan tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Keterlibatan orang-orang lain dalam konflik sebagai ungkapan rasa solidaritas juga tanpa memikirkan risiko dari konflik tersebut.

Dampak yang ditimbulkan sangat luas menyangkut seluruh aspek kehidupan, di antaranya:

- 1) Aspek pendidikan. Konflik di antara kedua belah pihak mempengaruhi proses belajar mengajar. Guru-guru maupun murid yang berasal dari Kelurahan Kayumalue menjadi terbatas ke sekolah karena keberadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Tawaeli. Setiap terjadi konflik, proses belajar mengajar terganggu dan tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan atau prestasi siswa yang berasal dari Kayumalue;
- 2) Aspek sosial budaya. Secara kultural kedua pihak termasuk dalam rumpun etnik Kaili namun subetnik yang berbeda. Tawaeli berasal dari subetnik Rai dan Kayumalue berasal dari subetnik Doi. Secara kekerabatan telah terjadi kawin-mawin di antara kedua subetnik tersebut. Ini berarti kedua belah pihak terikat dengan tali kekeluargaan yang kental. Dengan terjadinya konflik hubungan kekeluargaan menjadi renggang, saling curiga satu sama lain;
- 3) Aspek ekonomi. Terjadinya konflik mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar besar sebagai tempat menjual hasil-hasil pertanian terdapat di Tawaeli, sementara masyarakat Kayumalue menjadi khawatir untuk menjual hasil pertanian di wilayah Tawaeli. Untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat Kayumalue terpaksa menjual di pasar kecil di Kayumalue. Terjadi perbedaan aktivitas penjual dan pembeli antara Tawaeli dan Kayumalue, atau dengan kata lain lebih ramai penjual di Tawaeli daripada di Kayumalue. Keterbatasan penjualan hasil pertanian mengakibatkan keterbatasan pendapatan petani;
- dan 4) Aspek keamanan. Konflik juga berpengaruh terhadap keamanan masyarakat. Kebebasan masyarakat dalam beraktivitas menjadi terbatas. Pegawai provinsi dan kota yang berasal dari Tawaeli terpaksa meliburkan diri karena khawatir melewati Kayumalue, demikian pula masyarakat Kayumalue yang bekerja di Pantoloan terpaksa meliburkan diri. Aktivitas pada malam hari seperti pesta kawin maupun acara-acara lainnya tidak dapat dilakukan karena kekhawatiran terhadap lawan baik dari Tawaeli maupun Kayumalue.

Tradisi masyarakat Kaili memiliki budaya dalam menyelesaikan konflik, namun kekuatan kelembagaan sebagai lembaga yang berfungsi mengatasi masalah, khususnya konflik, telah mengalami degradasi yang ditandai dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi.

Salah satu budaya di Kaili adalah budaya *molibu*. *Molibu* adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat Sulawesi Tengah khususnya etnik Kaili dalam menyelesaikan persoalan. *Molibu* diartikan sebagai pertemuan atau musyawarah di mana seluruh anggotanya duduk melingkar dan kedudukan para anggotanya setara. *Molibu* merupakan cara meresolusi konflik. Alternatif seperti

itu adalah sejenis katup pengaman (*safety valve*) di mana dorongan-dorongan agresif atau permusuhan dapat diungkapkan dengan cara-cara yang tidak mengancam solidaritas. Misalnya, ketegangan antarpribadi dapat diungkapkan dalam bentuk jenaka atau lelucon dan lain-lain (Doyle Paul Johnson dalam Lawang, 1986).

Resolusi konflik antara Kayumalue yang pada saat itu bernama Kumbili dengan Tawaeli yang masih disebut Langgunu pada tahun 1888–1889 menunjukkan bahwa konflik pernah terjadi pada masa lalu dan dapat diselesaikan. Perdamaian pada saat itu diadakan di Tanah Mpedagi (Tanah Perdamaian) bertempat di Panimba yang sekarang disebut Labuan atau pelabuhan atau dengan kata lain Dermaga Perdamaian antara Kumbili dan Langgunu yang diatur oleh Belanda bersama penguasa Magau pertama yang bernama Yotolembah.

Dari pernyataan salah satu informan menandakan bahwa keterlibatan lembaga adat atau orang tua kampung sangat diperlukan karena konflik tersebut berindikasi sebagai akumulasi dari peristiwa yang lalu.

Perjanjian atau persetujuan damai ialah persetujuan antara dua pihak yang bertikai, biasanya negara atau pemerintahan, yang secara resmi mengakhiri konflik bersenjata. Persetujuan damai berbeda dari gencatan senjata, yakni persetujuan untuk mengakhiri pertikaian, atau penyerahan di mana militer setuju meletakkan senjata. Persetujuan damai sering berakhir dengan penentuan perbatasan dan pemulihan yang harus diwujudkan oleh negara-negara tersebut seusaia perang.

Perjanjian perdamaian ialah salah satu cara yang dilakukan untuk meredam konflik yang ada di Indonesia. Hal tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda, seperti halnya pada pihak Kayumalue maupun Tawaeli untuk meredam konflik yang terjadi antara kedua wilayah ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konflik antara masyarakat Kelurahan Kayumalue dan Kelurahan Tawaeli di Kota Palu dipicu oleh beberapa faktor utama. Faktor sejarah menjadi latar belakang penting, karena konflik telah terjadi sejak zaman kolonial Belanda. Permasalahan tapal batas juga menjadi salah satu sumber ketegangan antar masyarakat. Selain itu, konsumsi minuman keras oleh kelompok anak muda di kedua wilayah kerap memicu tindakan yang menimbulkan konflik terbuka. Keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya tingkat kesibukan juga berkontribusi pada munculnya konflik, karena waktu luang yang tidak dimanfaatkan secara positif mendorong perilaku yang berpotensi memancing keributan. Konflik ini berdampak negatif dengan melahirkan karakter saling dendam dan memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Namun demikian, terdapat pula dampak positif, yaitu meningkatnya solidaritas internal di masing-masing wilayah dan bertambahnya kreativitas kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai rekomendasi. Dengan tingkat kesibukan masyarakat saat ini, terutama karena aktivitas penambangan batu, gesekan antar kedua belah pihak dapat diminimalkan, meski perlu diantisipasi sampai kapan fenomena ini dapat bertahan. Hal ini menunjukkan pentingnya kesibukan atau aktivitas produktif dalam mencegah konflik. Oleh karena itu, diharapkan Walikota memberikan dukungan berupa fasilitas pendukung kegiatan tersebut, sehingga aktivitas masyarakat dapat diarahkan menjadi lebih bermanfaat dan mampu menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk menghindari konflik serupa di masa mendatang.

REFERENSI

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1990). *Riset Kualitatif untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode (Alih Bahasa oleh Munandir)*. Pusat Antar.

- Lan, T. J. (2006). Redefinisi Etnisitas dalam Konteks Kebudayaan Nasional. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 8(1), 124-140.
- Lawang, R. M. Z. (1986). *Sosiologi Klasik dan Modern*. Gramedia.
- Pigay, D. N. (2000). *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua: Sebelum, Saat, dan Sesudah Integrasi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Shadily, H. (1989). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sitorus, H. (21 Oktober 2003). *Problema Pluralitas dalam Otonomi Daerah: Rekonfigurasi Tata Etnik Untuk Integrasi Nasional*. [Makalah Disampaikan dalam Pelatihan Pendidikan Kebangsaan, Kantor Linmas Provinsi Sumatera Utara].
- Soenarto, K. (2003). *Pengantar Sosiologi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Press.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Kencana.